

# Penerapan *Smart Government* Dalam Mengembangkan Inovasi *Smart Village* Di Desa Gunung Putri

Salsabila<sup>1</sup>, Indra Aditya<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstrak:** Desa didorong untuk maju dan mandiri, dengan harapan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun desa menjadi lebih maju ialah menerapkan konsep smart village. Konsep smart village menurut Herdiana terdapat tiga komponen yakni Smart government, smart community dan smart environment. dalam penelitian ini akan membahas lebih jauh terkait penerapan smart government di desa Gunung Putri yang merupakan salah satu komponen pengembangan inovasi smart village. Terkait dengan metode pengukuran indikator smart government yang digunakan untuk mengukur kesiapan sebuah desa dalam penerapan smart government, peneliti menggunakan tiga indikator menurut Eniyati, Candra, Retnowati, dan Mulyani (2017). Indikator tersebut yaitu (1) partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) ketersediaan layanan publik dan sosial, dan (3) transparansi tata kelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart government dalam mengembangkan inovasi smart village di Desa Gunung Putri telah ada kemajuan yang signifikan yang ditandai dengan dibentuknya inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam hal pengembangan smart government khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan keterlibatan warga.

**Kata Kunci:** Smart Government, Desa, Teknologi Informasi dan Komunikasi

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.199>

\*Correspondence: Salsabila

Email:

[2010631180106@student.unsika.ac.id](mailto:2010631180106@student.unsika.ac.id)

Received: 11-09-2024

Accepted: 21-10-2024

Published: 07-11-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Villages are encouraged to be advanced and independent, with the hope that they can develop their various potentials for the advancement of village development. One of the things done by the Indonesian government in developing villages to become more advanced is implementing the smart village concept. The smart village concept according to Herdiana has three components, namely Smart government, smart community and smart environment. This research will further discuss the application of smart government in Gunung Putri village, which is one of the components of smart village innovation development. Regarding the method of measuring smart government indicators used to measure the readiness of a village in implementing smart government, researchers used three indicators according to Eniyati, Candra, Retnowati, and Mulyani (2017). These indicators are (1) community participation in governance, (2) availability of public and social services, and (3) transparency of governance. The method used in this research is qualitative with descriptive analysis, data collection is done by observation, interview and documentation methods. And the data used in the research are primary data and secondary data. The results showed that the application of smart government in developing smart village innovations in Gunung Putri Village has made significant progress which is marked by the formation of innovations that utilize information and communication technology. However, there are still challenges that need to be overcome in terms of smart government development, especially in increasing the effectiveness and involvement of citizens

**Keywords:** Smart Government, Village, Information And Communication Technology

## Pendahuluan

Kemajuan pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat. Pelayanan akan lebih mudah ditingkatkan dan menjadi lebih efektif dan efisien ketika teknologi digunakan dalam proyek pengelolaan masyarakat (Saidah, 2022:124). Dalam konteks pemerintah, pemanfaatan teknologi dilatar belakangi dari adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Tujuan utama untuk memajukan desa adalah adopsi e-government dalam administrasi daerah (Ridhawati, 2019:248). Guna mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki untuk memajukan pembangunan desa, desa diharuskan untuk maju dan mandiri. Menurut Pasal 72 UU Desa, dengan bantuan keuangan dari pemerintah dalam bentuk Dana Desa (DD) dan pemerintah daerah, pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Huda, 2020:540).

Indonesia harus memfokuskan upaya pembangunannya pada pembangunan pedesaan karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (Premana et al, 2022). Mengutip dari laporan kinerja tahun 2021 dari Kemendes PDTT, dijelaskan bahwa dari 74.957 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri. Adapun rinciannya yakni Desa Mandiri dengan jumlah 3.269 desa, Desa Berkembang dengan jumlah 53.404 desa dan Desa Tertinggal dengan jumlah 18.284 desa. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun desa menjadi lebih maju ialah menerapkan konsep smart village. Konsep smart village menurut Herdiana terdapat tiga komponen yakni yang pertama smart community, merupakan masyarakat yang menggunakan teknologi komunikasi untuk berkontribusi pada tata kelola pemerintahan. Lalu, smart environment adalah strategi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi dan mengatasi tantangan sosial dan lingkungan (Herdiana, 2019).

Dan terakhir yaitu smart government. Menurut Subekti dan Damayanti (2019), smart government memiliki pemahaman yang mirip dengan penerapan e-government, atau manajemen pemerintahan berbasis elektronik, melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahan desa, layanan desa secara elektronik, dan penggunaan media sosial untuk menginformasikan kepada masyarakat dan mendukung tujuan-tujuannya. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar fundamental bagi terciptanya konsep smart village, karena interaksi positif yang dihasilkan dari kombinasi ketiganya, yang didasarkan pada penerapan teknologi dan informasi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa dan 9 kelurahan. Dalam hal IDM Kabupaten Bogor menempati peringkat ke 7 di Provinsi Jawa Barat dan posisi ke-50 dari 434 kabupaten di seluruh Indonesia dengan jumlah nilai IDM mencapai 0,7700 poin.

Mengutip dari laman berita [diskominfo.bogorkab.go.id](http://diskominfo.bogorkab.go.id) dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, dalam waktu dekat akan meluncurkan Desa Cerdas berbasis teknologi informasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi desa dan melahirkan desa-desa inovatif di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Salah satu desa yang menerapkan konsep *Smart Village* di Kabupaten Bogor yaitu Desa Gunung Putri. Hal ini dikutip dari laman berita [radarbogor.id](http://radarbogor.id) bahwa kepala Desa Gunung Putri yakni Daman Huri mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Gunung Putri sudah mulai mempraktikkan inovasi *Smart Village* di wilayahnya. Pusat pelaksanaan *Smart Village* dilakukan di kantor desa serta disalurkan di beberapa RT di Desa Gunung Putri. Konsep *smart village* ini mulai diterapkan di Desa Gunung Putri pada bulan Januari tahun 2020. Namun mulai terasa diterapkannya *smart village* ketika didirikannya menara telekomunikasi milik desa dalam program pembangunan infrastruktur pada tahun 2021. Selain itu, hal yang paling terlihat dalam penerapan *smart village* di desa ini ialah pengembangan *smart government*. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya desa digital di desa Gunung Putri. Mengutip informasi dari [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) bahwasanya Desa Digital Gunung putri merupakan Desa Digital QRIS Netzme ke-lima. Desa digital QRIS Netzme lainnya adalah Desa Sukaraja (Ciamis), Desa Rambeanak (Magelang), Desa Tawang Sari (Boyolali), Desa Jabung (Klaten). Dalam hal ini Desa Gunung Putri membangun desa digital bekerja sama dengan PT Netzme dalam hal digitalisasi. Pengembangan di bidang *smart government* yang dilakukan oleh Desa Gunung Putri salah satunya yakni dalam memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang penggunaan *smart government* dalam penciptaan desa cerdas di Desa Gunung Putri dianggap menarik untuk membantu desa tersebut beranjak dari keterbelakangan menjadi desa yang maju dan mandiri. Dalam menganalisa penelitian ini dilakukan menggunakan indikator *smart government* menurut penelitian dari Eniyati, Candra, Retnowati, Mulyani (2017) yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan kerjasama dengan masyarakat, meliputi partisipasi masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan.
- b. Ketersediaan layanan publik dan sosial didefinisikan sebagai keberadaan pelayanan publik dan manajemen pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah secara online.
- c. Transparansi tata kelola menjelaskan bentuk media yang diberikan kepada publik untuk memperoleh informasi dan mekanisme transparansi program-program perencanaan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data deskriptif yang berasal dari bahasa tertulis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Purba et al., (2021) penelitian deskriptif ialah mengumpulkan informasi faktual tentang keadaan sekelompok manusia, suatu objek, suatu skenario, suatu cara berpikir, atau suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Kemudian data yang telah dikumpulkan untuk menguji hipotesis atau memberikan jawaban mengenai keadaan subjek penelitian saat ini. Studi deskriptif dirancang untuk memecahkan masalah, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan membandingkan data untuk menarik kesimpulan. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan smart government di Desa Gunung Putri dalam mengembangkan inovasi smart village. Penelitian ini memakai data sekunder yaitu dokumen-dokumen berisi laporan kinerja, Undang-Undang, Peraturan Daerah, buku, jurnal dan berita-berita yang berkaitan dengan penelitian. Serta data primer dalam penelitian ini yakni pemerintah desa Gunung Putri, Diskominfo Kabupaten Bogor dan masyarakat desa Gunung Putri. Serta pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Desa Gunung Putri telah melakukan pengembangan signifikan dalam bidang smart government, salah satunya melalui penyediaan informasi yang transparan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dengan membangun website desa yang dapat diakses di [gunungputri.desa.id](http://gunungputri.desa.id). Selain itu, desa ini telah mengimplementasikan pelayanan digital secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi modern melalui anjungan pelayanan mandiri. Meskipun tiang pintar atau smart pole masih dalam tahap perencanaan, diharapkan pembangunan tersebut dapat terealisasi dalam tahun ini.

Untuk mendukung pengembangan smart government, pemerintah desa juga membangun menara telekomunikasi dan menyediakan internet murah di tiap lingkungan. Kerjasama antara pemerintah desa dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor sangat penting dalam menerapkan inovasi ini, khususnya dalam pengembangan sistem aplikasi dan website desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo mengungkapkan bahwa mereka berperan dalam menyiapkan standar aplikasi yang memudahkan pelayanan publik di desa.

Salah satu inisiatif Diskominfo adalah program aplikasi SIDEDIGAYA (Sistem Informasi Desa Digital Warga Berdaya), yang merupakan aplikasi berbasis Android untuk mempermudah warga Kabupaten Bogor dalam mengakses layanan publik dan administrasi desa. Diskominfo juga menyediakan dukungan tambahan berupa PC komputer dan akses jaringan internet, serta pelatihan dalam digitalisasi dan sarana domain untuk aplikasi atau website desa.

Secara keseluruhan, penerapan smart government di Desa Gunung Putri memainkan peran penting dalam menggerakkan digitalisasi desa, dengan beberapa indikator keberhasilan yang diidentifikasi oleh Eniyati, Candra, Retnowati, dan Mulyani (2017). Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat.

#### **A. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

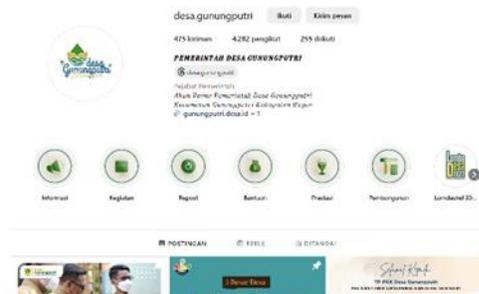
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Putri menunjukkan kemajuan yang baik, di mana pemerintah desa aktif mengelola dan mengkoordinasikan keterlibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan. Sekretaris desa menjelaskan bahwa pemerintah sering mengadakan rapat atau musyawarah desa untuk menginformasikan dan mendiskusikan berbagai isu, termasuk rencana pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam rapat ini sudah cukup baik, dengan peluang bagi warga untuk menyampaikan kritik dan saran. Rapat tersebut diadakan secara rutin, minimal enam kali dalam satu tahun. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 1. Musyawarah Desa

Untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, desa memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Setiap ketua RT dan RW diundang untuk

mengikuti sosialisasi di aula Desa Gunung Putri. Selain itu, pemerintah desa juga membagi tim untuk turun langsung ke berbagai lingkungan, melakukan observasi dan sosialisasi. Di era digital, informasi administrasi kependudukan, seperti KTP digital, disebarluaskan melalui akun Instagram resmi @desa.gunungputri, yang mencakup informasi tentang pelayanan administrasi, bantuan sosial, dan program pembangunan desa.



Gambar 2. Akun Instagram Desa Gunung Putri

Pemerintah desa juga memanfaatkan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram untuk menjaga interaksi yang aktif dengan warga. Dengan menggunakan platform ini, informasi mengenai agenda desa dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tidak lepas dari tantangan. Sekretaris desa mencatat bahwa banyak lansia mengalami kesulitan dalam menggunakan media sosial akibat kurangnya pemahaman tentang digitalisasi. Meskipun demikian, ada beberapa orang tua yang menunjukkan semangat untuk belajar dan beradaptasi dengan inovasi tersebut. Selain itu, ada juga tantangan terkait apatisme di kalangan sebagian masyarakat terhadap program-program pemerintah, yang dapat berdampak negatif pada kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini menyiratkan bahwa diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap inovasi, meskipun ada kemajuan dalam partisipasi masyarakat.

## B. Ketersediaan Layanan Publik dan Sosial

Unsur utama dari tata kelola pemerintahan adalah pelayanan publik, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang terbaik untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik ialah pemenuhan kebutuhan setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Gunung Putri berdedikasi untuk meningkatkan standar pelayanan publik melalui penerapan kemajuan teknologi informasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, menjadikan digitalisasi sebagai salah satu taktik utama untuk mencapai layanan yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, penggunaan teknologi informasi diharapkan bisa meningkatkan pemberian layanan dan memungkinkan peningkatan daya tanggap terhadap permintaan masyarakat.

Ketersediaan layanan publik dan sosial di Desa Gunung Putri diartikan sebagai akses terhadap pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang diberikan secara online oleh pemerintah desa. Secara umum, ketersediaan layanan ini telah dikategorikan baik, ditandai dengan adanya inovasi berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Desa (SID). SID ini berfungsi untuk mengelola data kependudukan, administrasi, dan pelayanan publik dengan lebih efisien, sehingga warga dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan desa, termasuk surat-menyurat, melalui website [gunungputri.desa.id](http://gunungputri.desa.id).



Gambar 3. Sistem Informasi Desa Gunung Putri

Selain itu, terdapat juga anjungan pelayanan mandiri yang memanfaatkan teknologi modern, meskipun saat ini baru tersedia alatnya. Wawancara dengan sekretaris desa dan ketua RW setempat mengungkapkan bahwa alat tersebut belum dapat digunakan karena perlu dilakukan pengecekan kesiapan sistem dan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara penggunaannya.



Gambar 4. Anjungan Desa Mandiri

Pemerintah desa juga sedang mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan akses warga terhadap berbagai layanan publik, seperti pengajuan izin, laporan pengaduan, dan informasi kegiatan desa. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga, namun saat ini masih dalam tahap penyesuaian sistem dan diharapkan dapat diluncurkan tahun ini.



Gambar 5. Menara Telekomunikasi

Untuk mendukung pengembangan smart government, pemerintah desa membangun menara telekomunikasi dan menyediakan internet murah di setiap lingkungan. Namun, implementasi inovasi layanan publik dan sosial di Desa Gunung Putri menghadapi beberapa hambatan signifikan. Meskipun telah diresmikan, situs web desa masih belum digunakan secara maksimal, karena masih banyak warga yang lebih memilih untuk mendapatkan layanan secara langsung di kantor desa. Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa mereka belum pernah memanfaatkan layanan yang tersedia secara online, mencerminkan rendahnya minat masyarakat terhadap platform digital tersebut. Selain itu, tim IT desa mengungkapkan tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur, seperti konektivitas internet yang buruk dan kurangnya perangkat keras

yang diperlukan, yang menghambat penyelenggaraan pelayanan publik dan sosial yang lebih efektif melalui teknologi informasi dan komunikasi.

### C. Transparansi Tata Kelola

Transparansi tata kelola menjelaskan bentuk media yang diberikan kepada publik untuk memperoleh informasi dan mekanisme transparansi program-program perencanaan. Transparansi tata kelola di Desa Gunung Putri menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat dan mekanisme keterbukaan program perencanaan. Pemerintah desa telah mengambil langkah untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Sekretaris desa menjelaskan bahwa desa memfasilitasi transparansi keuangan dengan memasang banner di billboard yang berisi informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), penggunaan, dan laporan anggaran.



Gambar 6. Billboard Info APBDes

Selain itu, informasi juga disampaikan melalui media online, seperti Instagram Desa Gunung Putri dan website desa. Di samping cara digital, pemerintah desa juga mengadakan musyawarah desa setiap enam bulan untuk melaporkan realisasi penggunaan APBDes secara konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa menunjukkan bahwa transparansi tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah desa dianggap cukup baik. Masyarakat merasa bahwa informasi mengenai kebijakan dan keputusan desa mudah diakses dan dipahami melalui media sosial serta musyawarah desa. Namun, tingkat kepuasan terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pembaruan informasi keuangan, yang sering kali lambat diposting di website dan media

sosial. Selain itu, Tim IT desa Gunung Putri mengungkapkan bahwa tantangan dalam penggunaan teknologi untuk transparansi tata kelola meliputi kurangnya keterampilan teknologi di kalangan warga dan staf desa, yang menghambat efektivitas penggunaan teknologi baru dalam menjamin transparansi tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan mengenai penerapan smart government dalam mengembangkan inovasi smart village di Desa Gunung Putri menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan yang signifikan yang ditandai dengan dibentuknya inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam hal pengembangan smart government khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan keterlibatan warga.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Pemerintah desa aktif dalam mengoordinasikan keterlibatan masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi, yang menunjukkan komitmen untuk mendorong partisipasi. Namun, terdapat tantangan terkait pemahaman digital di kalangan lansia dan apatisme sebagian masyarakat terhadap program pemerintah, yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan keterlibatan mereka.
2. Ketersediaan Layanan Publik dan Sosial: Upaya pemerintah desa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti melalui Sistem Informasi Desa dan aplikasi mobile, menunjukkan potensi yang besar. Namun, hambatan seperti konektivitas internet yang buruk dan kurangnya perangkat keras masih menghambat optimalisasi layanan tersebut. Masyarakat cenderung lebih memilih datang langsung ke kantor desa, yang menunjukkan rendahnya minat terhadap platform digital yang ada.
3. Transparansi Tata Kelola: Upaya pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan penggunaan media online patut diapresiasi. Meskipun warga merasa akses informasi cukup baik, mereka menilai bahwa pembaruan informasi keuangan sering lambat, dan keterampilan teknologi yang rendah di antara warga serta staf desa menjadi tantangan dalam meningkatkan transparansi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, meskipun Desa Gunung Putri telah mengambil langkah positif dalam mengimplementasikan inovasi layanan publik dan memperbaiki transparansi. Namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## Referensi

- A Purba, R. (2021). *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan kita menulis.
- diskominfo.bogorkab.go.id. (2018, 24 Oktober). *Bangun Desa Cerdas Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Diakses 24 Oktober 2023, dari <https://diskominfo.bogorkab.go.id/bangun-desa-cerdas-menuju-ekonomi-kerakyatan/>
- Eniyati, S., Santi, R. C. N., Retnowati, R., Mulyani, S., & Martha, K. (2017). Perhitungan tingkat kesiapan implementasi smart city dalam perspektif smart governance dengan metode fis mamdani. *Dinamik*, 22(1), 39-48.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia (Developing the smart village concept for Indonesian villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 539-556.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Laporan Kinerja Kemendes PDTT Tahun 2021
- mediaindonesia.com. (2022, 25 Agustus). *Digitalisasi Desa di Kabupaten Bogor untuk Kendalikan Inflasi Kerja Bareng BI-Netzme*. Diakses 27 Maret 2024, dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/517577/digitalisasi-desa-di-kabupaten-bogor-untuk-kendalikan-inflasi-kerja-bareng-bi-netzme>
- Premana, A., Sucipto, H., & Widiyanto, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja). *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(1), 43-54.
- Ridhawati, E., Fitriani, Y., Sari, D. N., & Pratama, R. (2019). Penerapan E-Goverment Pada Pekon Sukamulya (Studi Kasus: Pekon Sukamulya Pringsewu). *Jurnal Cendikia*, 17(1), 246-250.
- Saidah, M. A., Istan, M., & Fitmawati, F. (2022). *Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwakarya Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, IAIN Curup)*.

Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. JPALG (Journal of Public Administration and Local Governance). 18-28

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Yanti, D. Y. (2024). Pelaksanaan Smart Village Nusantara Dalam Perspektif Smart Governance Di Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Journal of Politic and Government Studies, 13(2), 748-764.